

Analisis Kapasitas Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah: Studi Deskriptif Pemerintah Daerah di Provinsi Bali

Ni Putu Kusuma Jayanthi¹ Ni Putu Ayunda Astyka Dewi² Ni Wayan First Honey Octaviani³ Ni Putu Selly Patricia Dewi⁴ dan Ni Wayan Kiki Jayanti Pratiwi Sujana⁵

¹²³⁴⁵ Pascasarjana Universitas Udayana

e- mail: yanthilahne@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali serta keterkaitannya dengan arah pembangunan daerah yang diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kapasitas fiskal menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019–2023 yang telah diaudit oleh BPK RI. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas yang signifikan dalam kemandirian fiskal antar daerah, dengan rasio tertinggi mencapai 409,67% dan terendah hanya 15,56%. Pola hubungan keuangan daerah dengan pemerintah pusat juga bervariasi, mulai dari instruktif (sangat bergantung) hingga delegatif (sudah mandiri). Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar antara 74,18% hingga 114,95%, menunjukkan tingkat efektivitas yang tidak merata. Sebanyak enam daerah dikategorikan tidak efisien dalam belanja daerah, meskipun beberapa di antaranya memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi. Rasio belanja terhadap PDRB sebagian besar berada di bawah rata-rata provinsi, menandakan kontribusi fiskal daerah terhadap perekonomian masih terbatas. Belanja non-pegawai per penduduk yang efisien cenderung memberikan dampak positif terhadap peningkatan IPM, sedangkan belanja besar tidak selalu menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemampuan Fiskal Daerah; Kinerja Keuangan; Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Abstract

This study aims to analyze the fiscal capacity and financial performance of local governments in Bali Province and their relation to regional development, as measured by Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the Human Development Index (HDI). Fiscal capacity serves as a key indicator of a region's ability to independently finance its expenditures without excessive reliance on central government transfers. This research using a descriptive quantitative method with secondary data from the audited Local Government Financial Reports (LKPD) for the period 2019–2023 by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). The results reveal significant disparities in fiscal independence among local governments, with the highest ratio reaching 409.67% and the lowest at 15.56%. The pattern of intergovernmental fiscal relations ranges from instructive (highly dependent) to delegative (fully autonomous). The effectiveness ratio of local own-source revenue (PAD) varies between 74.18% and 114.95%, indicating uneven revenue performance. Six local governments are categorized as inefficient in public spending, although some exhibit high fiscal independence. The ratio of regional expenditure to GRDP mostly falls below the provincial average, suggesting a limited fiscal role in driving regional economic growth. Additionally, efficiency in non-personnel expenditure per capita tends to correlate positively with improvements in IPM, while larger but less targeted spending does not necessarily result in better development outcomes. This study highlights the importance of strengthening fiscal capacity and improving spending efficiency to enhance regional financial performance and support sustainable economic and social development.

Keyword: The Fiscal Capacity; Financial Performance; Regional Fiscal Capacity Ratio